
PASPOR SOSIAL: STRATEGI OPTIMALISASI DANA BANTUAN SOSIAL (BANSOS) LOGISTIK KEBENCANAAN MELALUI *THE HOUSE MODEL*

Oleh

Rudi Triyono¹, Lindawati Kartika²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University

E-mail: ¹ruditriyono83@gmail.com, ²lindawati.kartika@gmail.com

Article History:

Received: 08-06-2022

Revised: 20-06-2022

Accepted: 12-07-2022

Keywords:

Aplikasi, Bencana, Big Data,
Logistik, paspor Sosial

Abstract: Permasalahan yang dihadapi oleh pendistribusian bantuan sosial (bansos) logistik bencana biasanya terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan juga birokrasi. Hal ini menyebabkan pendistribusian bantuan logistik menjadi tidak merata. Prosedur yang hierarki menuntut proses yang seharusnya dapat berjalan dengan cepat dan merata menjadi lambat. Metode yang digunakan karya tulis ilmiah ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan pada penulisan ini adalah data sekunder, yang didapat dengan pengumpulan dan analisis data melalui berbagai literatur. Penulisan ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi kondisi dan permasalahan penyelewengan dana bansos logistik kebencanaan di Indonesia; (2) mengetahui proses pengumpulan dan penyaluran dana bansos logistik kebencanaan yang ideal; (3) membuat desain arsitektur strategi optimalisasi logistik kebencanaan melalui *the house model*. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa: (1) permasalahan korupsi dana bansos logistik kebencanaan dipengaruhi oleh empat faktor dan tidak adanya lembaga khusus diyakini sebagai faktor utama maraknya kasus korupsi dana bansos logistik kebencanaan; (2) Kondisi ideal pengumpulan dan penyaluran dana bansos logistik kemanusiaan hendaknya dilakukan secara bersama melalui proses kontrol yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder sesuai *quadruple helix*; (3) Grand Design Strategi optimalisasi dana bansos logistik kebencanaan melalui platform Social Passport menggunakan stakeholder analysis, gap analysis, serta PDCA analysis. Social Passport memiliki enam fitur besar atau interface meliputi On Going, Pengadaan, Pengaduan, Tracking, Rekap, dan edukasi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam cukup tinggi. Setelah negara Cina, Amerika Serikat dan Filipina, Indonesia menjadi nomor urut ke empat dalam kategori sering terkena bencana alam (CRED 2012). Berdasarkan Findayani (2015), kondisi ini terjadi karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara geografis terletak di persimpangan tiga lempeng utama, lempeng Eurasia di utara dan lempeng Pasifik Timur dan lempeng Indo-Australia di selatan menyebabkan Indonesia rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami.

Dilansir dari halaman Kompas oleh Saptoyo (2021) bahwa dampak bencana alam sepanjang tahun 2021 sudah menyebabkan 191 korban meninggal dunia dan 9 orang hilang. Selain itu, korban luka-luka mencapai 12.042 orang sedangkan yang menderita dan mengungsi akibat bencana tercatat sebanyak 1.548.173 orang. Berbagai bencana yang melanda sejak 2021 mengakibatkan kerusakan bangunan dan kekurangan persediaan pangan di sejumlah wilayah di Indonesia. Hasil penelitian UNISDR menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kemungkinan paparan bencana yang menyebabkan kehilangan nyawa tertinggi didunia seperti potensi tsunami yang menempatkan Indonesia menjadi peringkat pertama negara paling rawan dari total 265 negara dunia.

Keseluruhan bencana tersebut mampu mengakibatkan persediaan logistik terganggu mulai gagal panen sampe aliran barang, uang, dan informasi yang tersendat. Kondisi ini diperparah dengan maraknya kasus korupsi dana sosial yang ditujukan untuk masyarakat korban bencana seperti kasus proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) gempa Palu 2018 dan dana penanganan bencana gempa Lombok 2018 (BBC 201, Kumparan 2020). Lebih lanjut berdasarkan catatan Republika, selama 10 tahun terakhir dana penanganan bencana kerap disalahgunakan atau dikorupsi baik oleh oknum pejabat pemerintah, legislative, hingga pihak swasta (Hafil, 2019). Informasi tersebut semakin diperkuat dari indeks korupsi global, berdasarkan laporan Global Corruption Barometer, Indonesia menempati peringkat ke tiga negara terkorup di asia (Faqih, 2020). Lebih lanjut Transparency International Indonesia (TII) menyampaikan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia menempati peringkat 102 dunia dari total 180 negara dengan skor 37. Bahkan skor ini masih lebih rendah dari Timor Leste (Ramadhan, 2021).

Selain karena korupsi, faktanya lambat dan kurangnya bantuan logistik yang diterima pengungsi setidaknya disebabkan oleh ketiga hal berikut ini: (1) sulitnya koordinasi antar pendonor (pemberi bantuan) dengan pemerintah selaku penyalur bantuan; (2) sulitnya mengakses lokasi baik informasi detail perjalanan yang tidak tersedia secara memadai; (3) ketidaktahuan antara pemerintah dan korban bencana yang terkena dampak, hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi pemerintah mengenai daerah terdampak yang belum tersentuh bantuan serta masyarakat dan pejabat setempat tidak mengetahui kepada siapa mereka akan menginformasikan kebutuhan logistik didaerah tersebut (Aji, 2018). *Supply Chain* logistik kebencanaan yang terkoordinir dengan baik dengan kerangka Sistem yang terstruktur secara efektif dan efisien dirasa mampu mempercepat proses tanggap bencana sehingga bantuan dapat segera diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

LANDASAN TEORI

Deskripsi Bencana

Berdasarkan Heryana (2020). bencana dalam terminologi bahasa inggris disebut dengan *disaster*, berasal dari kata latin yaitu *dis* yang berarti buruk atau terasa tidak nyaman dan *astro/aster* berarti bintang. Bencana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana memiliki pengertian sebagai peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana dapat terjadi melalui proses yang panjang atau situasi tertentu dalam waktu yang sangat cepat tanpa adanya tanda-tanda (Surwaningsih *et al.* 2019).

Klasifikasi Bencana

Berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, berdasarkan potensinya, jenis bencana dibagi menjadi tiga kelompok yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana social. Bencana alam antara lain berupa letusan gunung berapi, gempa bumi karena alam, tanah longsor, angin topan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, kekeringan, hama penyakit tanaman, wabah epidemi, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kegagalan konstruksi/teknologi, kecelakaan transportasi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi. Bencana sering menimbulkan kepanikan masyarakat dan menyebabkan penderitaan dan kesedihan yang berkepanjangan, seperti luka, kematian, tekanan ekonomi akibat hilangnya usaha atau pekerjaan dan kekayaan harta benda, kehilangan anggota keluarga serta kerusakan infrastruktur dan lingkungan (Husna 2012).

Manajemen Bencana

Penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan baik sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana (Murliana *et al.* 2019). Mekanisme penanggulangan bencana melibatkan instansi-instansi terkait seperti BNPB, BPBD, komandan penanganan darurat. Manajemen bencana menurut Kurniyanti (2012) dapat dipahami sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan bencana dan keadaan darurat, sekaligus memberikan kerangka kerja untuk menolong masyarakat dalam keadaan berisiko tinggi agar dapat menghindari ataupun pulih dari dampak bencana. Prinsip utama dalam manajemen bencana adalah kalau tidak mampu mencegah terjadinya bencana, maka wajib mengurangi jumlah korban jiwa (Prihatin 2018). Berikut bagan alir mekanisme tanggap bencana yang dapat dilihat pada.

Institusi Penanggulangan Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan institusi resmi milik pemerintah yang memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana alam (Hadi *et al.* 2019). Badan tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang merupakan penjabaran dari ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Salah satu tugas BNPB adalah melakukan kegiatan penyebaran

informasi bencana sebagai upaya memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat agar terhindar dari ancaman bencana yang dapat terjadi kapan saja (Murliana *et al.* 2019). Pentingnya institusi ini secara nasional juga harus diperkuat dengan adanya institusi sejenis di level lokal yakni di daerah-daerah. Oleh karenanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi institusi lokal yang harus juga berperan besar menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana yang terjadi di tingkat daerah sebagai turunan dan perpanjangan tangan dari BNPB (Anam *et al* 2018).

Bantuan Sosial Logistik

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik nomor 176 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Hibah Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang, bantuan social merupakan upaya pemberian pertolongan baik berupa uang dan/atau barang kepada pihak yang membutuhkan, agar yang bersangkutan mampu mempertahankan hidup, melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar serta terlindunginya dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Lebih lanjut, Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan social, sehingga upaya pengawasan dan control atas dana bansos merupakan kewajiban seluruh elemen masyarakat. Sampai saat ini, pengurusan dana bantuan social masih ditangani oleh Kementrian Sosial yang mendapatkan audit dari Badan Pengawas Keuangan sehingga belum adanya keterlibatan pihak non-*government* secara massif.

Logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan, aliran biaya yang efektif, penempatan *raw material*, proses *inventory*, barang jadi serta informasi yang berhubungan dari titik asal kepada titik pemakai untuk tujuan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan (Purbayu dan Agustiningsih 2016). Berdasarkan Sahilala *et al.* (2013), bantuan yang dibutuhkan sebagian besar masyarakat untuk penanggulangan bencana adalah bantuan logistik yang mencakup kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti sembako, makanan siap saji, selimut, matras dan lainnya. Menurut Pudjiono dalam Damanik *et al.* (2015), pendistribusian logistik kemanusiaan bencana biasanya menghadapi beberapa kendala yaitu terbatasnya ketersediaan barang pada gudang penyalur, jarak tempuh, waktu distribusi, kapasitas angkut dan ketersediaan sarana transportasi. Berdasarkan Purbayu dan Agustiningsih (2016), penyaluran bantuan logistik selama ini masih menggunakan cara manual dan persebaran posko seringkali menumpuk di titik tertentu. Hal ini tentu kurang efektif dan membutuhkan waktu yang lama sehingga masalah yang muncul adalah bantuan yang ada belum dapat tersalurkan dengan tepat. Penyebab kurang meratanya bantuan antara lain kurang meratanya informasi lokasi korban atau posko pengungsian dan tidak diketahuinya kebutuhan bahan bantuan logistik pada setiap posko pengungsi (Purbayu dan Agustiningsih 2016).

Aplikasi Berbasis Big Data

Teknologi informasi dan meningkatnya jumlah pengguna internet menyebabkan perusahaan teknologi informasi mulai beralih menuju aplikasi (Purbayu dan Agustiningsih 2016). *Big data* adalah istilah yang diberikan pada kumpulan data yang beukuran sangat besar dan kompleks, sehingga tidak memungkinkan untuk diproses menggunakan perangkat pengelola database konvensional ataupun aplikasi pemroses data lainnya (Maryanto 2017). Aplikasi mobile memungkinkan operator untuk mengakses sistem melalui perangkat mobile (Fitriansyaah *et al.* 2013). Karya dan Moertini (2017) menyatakan bahwa *Big Data* memiliki

value berupa pola/ pengetahuan bagi organisasi yang dapat diekstrak melalui proses big data analysis yang termasuk dalam konteks *knowledge data discovery*. Berdasarkan kebutuhan dan teknologi yang ada saat ini maka pembuatan aplikasi berbasis *Big Data* untuk mengolah informasi terkait pendistribusian Logistik dalam penanggulangan bencana sangat dibutuhkan.

Entity Relationship Diagram

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah suatu model jaringan (*network*) yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak (Purbayu dan Agustiniingsih 2016). Tujuan utama dari penggambaran ERD adalah untuk menunjukkan struktur objek data (*entity*) dan hubungan yang ada pada objek tersebut. Ketika entitas berhubungan dengan entitas lain akan terdapat relasi tertentu seperti *one to one*, *one to many* dan *many to many* (Setiawati *et al.* 2015).

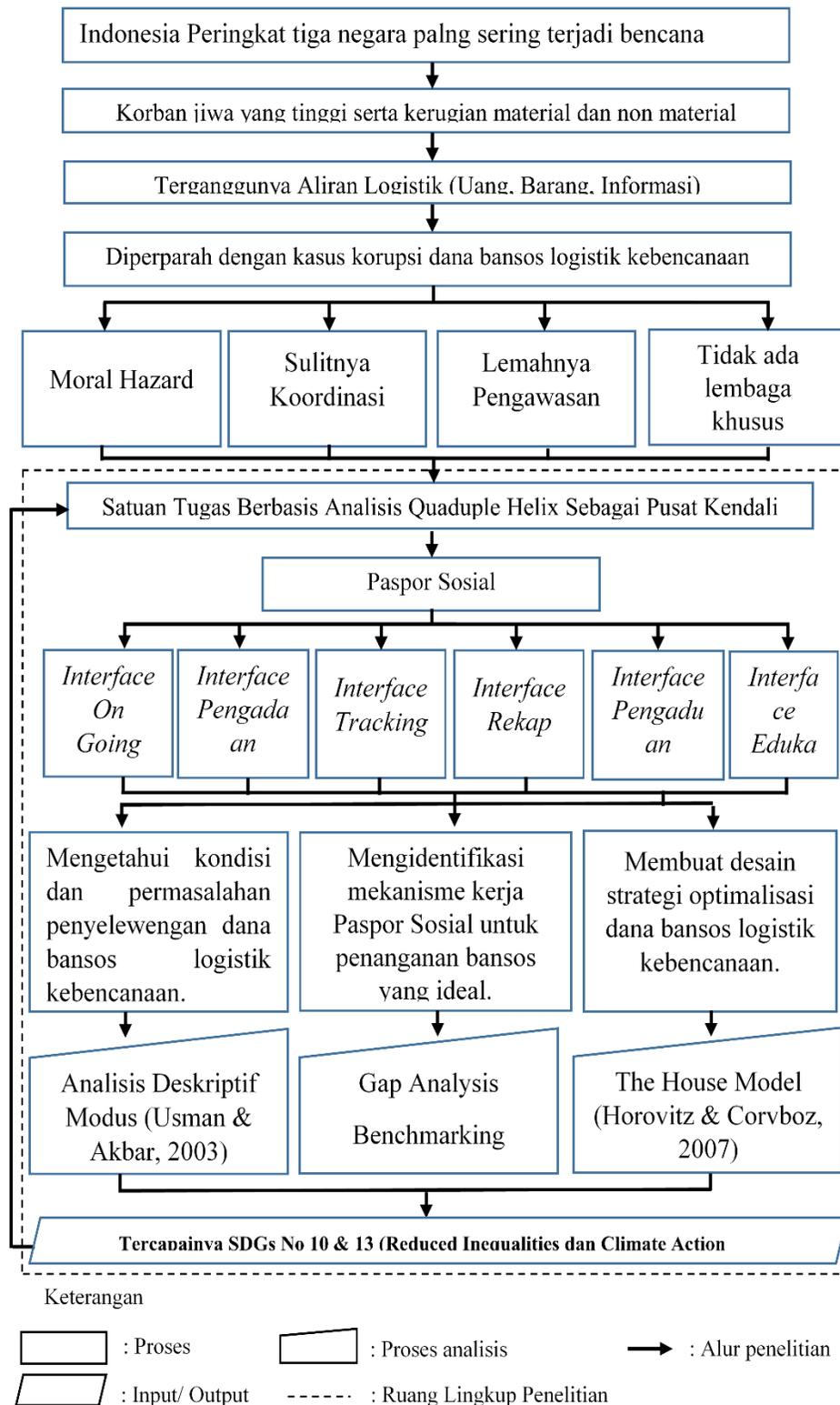
Manajemen Logistik Kebencanaan

Manajemen rantai pasok (*Supply Chain Management/SCM*) merupakan keseluruhan koordinasi dan integrasi atas aliran uang, barang, dan informasi dari semua entitas bisnis yang terlibat dalam keseluruhan rantai pasok (Saptana & Ilham 2017). Manajemen rantai pasokan yang sukses membutuhkan banyak keputusan yang berkaitan dengan arus informasi, produk, dan dana. Setiap keputusan harus dibuat untuk meningkatkan surplus rantai pasokan. Keputusan ini terbagi dalam tiga kategori atau fase, tergantung pada frekuensi setiap keputusan dan kerangka waktu di mana fase keputusan berdampak (Chopra & Meindl, 2013). Manajemen logistik untuk penanggulangan bencana dikenal dengan logistik kemanusiaan (*humanitarian logistics*) atau sering disebut juga dengan logistik bantuan kemanusiaan. Logistik kemanusiaan merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran bantuan kemanusiaan secara efisien, hemat biaya dan penyimpanan bantuan kemanusiaan serta informasi terkait, dari titik asal ke titik konsumsi untuk tujuan mengurangi penderitaan korban bencana (Thomas dan Kopczak, 2005; Zaroni, 2017).

METODE PENELITIAN

Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran pada karya tulis ini dalam menyelesaikan permasalahan dan mencapai tujuan SDGs ditunjukkan pada **gambar 1**.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran (Sumber: Penulis 2022)

Jenis dan Sumbe Data

Karya tulis ini menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya. Data dihimpun dari berbagai jurnal dan artikel ilmiah internasional atau nasional bereputasi, buku, berita nasional, laporan tahunan kementerian terkait seperti BNPB dan lain sebagainya.

Analisis Gap

GAP *analysis* atau biasa disebut sebagai analisa kesenjangan merupakan analisa yang membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan atau potensial. Pelaku bisnis menggunakan GAP analysis sebagai media dalam mengevaluasi bisnis dengan cara membandingkan kinerja perusahaan saat ini dengan kinerja yang sudah ditargetkan pada periode sebelumnya serta menentukan tahapan yang perlu dilakukan untuk meminimalisir kesenjangan tersebut serta upaya mencapai kondisi yang diharapkan di masa depan (Jienardy, 2017).

Analisis Fishbone

Menurut Ishikawa (1968) bahwa diagram Ishikawa (diagram sebab akibat, tulang ikan, atau Fishikawa) adalah diagram yang menunjukkan penyebab peristiwa tertentu.

Analisis Stakeholder (Quadruple Helix)

Dilansir dari Brugha (2014), *stakeholder analysis* merupakan *tools* yang digunakan untuk mengambil atau mengimplementasikan kebijakan dengan cara memahami hubungan antara aktor-individu-organisasi beserta sumber daya, kepentingan dan pengaruh satu sama lain. stakeholder analysis penting dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling terpengaruh dari suatu kegiatan pembangunan (Race & Millar, 2006). *Stakeholder analysis* ditinjau dengan menggunakan *quadruple helix* model yaitu model menghubungkan antara pemerintah (*government*) sebagai pembuat kebijakan, universitas (*university*) berperan sebagai peneliti, industri (*industry*) yang menggerakkan ekonomi dan komunitas (*citizen*) yang menjadi penghubung dari ketiga stakeholder tersebut (Hunadi & Dhewanto, 2015).

Bhencmarking

Benchmarking adalah suatu proses pengukuran dengan membandingkan sebagian atau seluruh praktik bisnis yang kita lakukan dengan kompetitor terbaik dengan tujuan meningkatkan kualitas perusahaan (Paulus dan Devie, 2013).

PDCA

PDCA (*Plan, Do, Check, Act*) PDCA Cycle mengilustrasikan bahwa proses input, olah, dan output berlangsung secara berkelanjutan (*sustainable*). PDCA bisa digunakan sebagai alat dalam mempraktikkan *continuous improvement* (Deming, 1982).

The House Model

The House Model adalah konsep yang digunakan perusahaan sebagai upaya menyusun tindakan-tindakan untuk mencapai mimpi. Menurut Horovitz dan Corbooz (2007), terdapat tiga komponen untuk membangun suatu visi yang baik sebagai tempat impian (atap), pilar yang terdiri atas metode untuk mencapai visi, dan fondasi sebagai indikator utama peningkatan kerja dan perilaku faktor pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Bencana di Indonesia

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku lembaga resmi pemerintah yang memiliki tupoksi penanganan kebencanaan di Indonesia telah merilis kajian risiko bencana tahun 2016 dengan kriteria potensi jiwa terpapar resiko, kerugian fisik, ekonomi,

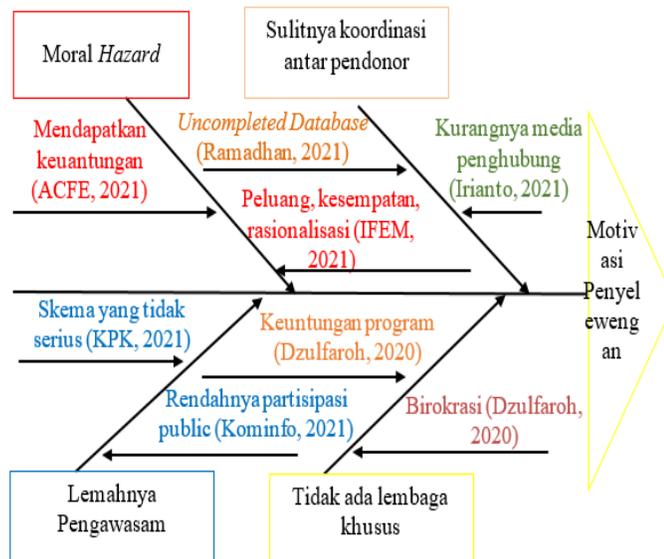
dan lingkungan yang tersebar di seluruh wilayah NKRI dengan kategori sedang - tinggi meliputi:

Tabel 1. Kajian risiko bencana (Sumber: Inarisk, BNPB)

Jenis Bencana	Luas Bahaya (Ha)	Jiwa Terpapar	Fisik (Rp. milyar)	Ekonomi (Rp. milyar)	Lingkungan (Ha)
Banjir	39.371.167	100.814.666	176.329.821	140.520.440	12.135.957
Banjir Bandang	2.733.966	8.637.161	44.679.539	15.358.006	1.056.365
Cuaca Ekstrim	106.582.476	244.295.774	11.972.702	3.088.869	0
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	1.888.085	4.917.327	22.042.350	1.290.842	460.252
Gempabumi	52.374.614	86.247.258	466.689.834	182.185.171	0
Kebakaran Hutan dan Lahan	86.457.259	0	0	59.036.830	41.856.289
Kekeringan	46.735.107	48.491.666	0	192.737.143	29.820.457
Letusan Gunung Api	1.162.220	3.910.775	2.695.427	12.613	139.676
Tanah Longsor	57.418.460	14.131.542	78.279.825	75.870.343	41.337.707
Tsunami	961.133	3.702.702	71.494.821	7.976.358	119.688

Berdasarkan table 1 dapat diketahui bahwa cuaca ekstrim dan tanah longsor menjadi bencana dengan luas bahaya paling tinggi di Indonesia sebesar 106.582.476 Ha dan 57.418.460 Ha, selanjutnya berdasarkan banyaknya jiwa yang terpapar, cuaca ekstrim masih menempati urutan pertama mencapai 244.295.774 jiwa diikuti bencana banjir mencapai 100.814.666 jiwa. Ditinjau dari kerusakan fisik, gempa bumi menempati posisi pertama penyebab kerugian fisik terbesar mencapai Rp 466.689.834 milyar, sedangkan dari segi kerugian ekonomi, kekeringan menempati posisi pertama dengan total kerugian mencapai Rp 192.737.143 milyar. Terakhir, dari segi lingkungan, kebakaran hutan menjadi penyumbang terbesar kerusakan lingkungan akibat bencana.

Hasil Identifikasi Penyebab Penyelewengan Dana Bansos Logistik Kebencanaan melalui *Fishbone* Diagram



Gambar 2. *Fishbone Analysis* Alasan Penyebab Penyelewengan Dana Bansos

Bedasarkan gambar 2, alasan penyebab penyebab penyelewengan dana bansos dari segi Moral Hazard, Sulitnya Koordinasi antar Pendonor, Lemah Pengawasan, dan Tidak ada Lembaga Khusus dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada karya tulis ini, penulis akan fokus kepada kelompok faktor tidak adanya lembaga khusus sehingga akan disediakan alternative solusi melalui pendekatan tersebut.

Hasil Analisis Peran dan Pemetaan Penanganan Bansos Logistik Kebencanaan melalui Benchmarking, Gap Analysis, dan Stakeholder Analysis

4.3.1 Benchmarking

Dalam penulisan karya tulis ini, dilakukan analisis *benchmarking* dari negara Jepang, Jerman, Amerika, dan Australia yang menjadi negara dengan tingkat kasus korupsi terendah, mencakup pemangku kepentingan yang memiliki peran utama dan jenis program yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis *Benchmarking* Beberapa Negara

Negara	Jepang	Jerman	Amerika	Australia
Stakeholder Utama	<i>Government</i>	<i>Community</i>	<i>Government</i>	<i>Government</i>
Program Unggulan	Pemberian dana bantuan dengan proses birokrasi yang singkat serta menargetkan seluruh penduduk	Gabungan relawan yang terkoordinir dengan pemerintah dalam upaya penyiapan logistik kemanusiaan bencana	Proses manajemen dana bansos yang langsung dikelola oleh negara bagian serta adanya perlindungan asuransi	Pengaturan pendanaan pemulihan bencana yang mudah diakses oleh masyarakat serta berbasis online
Rank	19	9	25	11

 Terbersih

 Korupsi

Gap Analysis

Tabel 3. Hasil Analisis Gap

<i>Current Situation</i>	<i>Future Situation</i>
1. Belum adanya satuan tugas (satgas) khusus pengelolaan dana bansos logistik kebencanaan.	1. Adanya satgas yang khusus mengelola dana bansos mulai dari proses input sumberdaya sampai penyalurannya.
2. Belum adanya keterlibatan pihak <i>community</i> , <i>business</i> , dan akademisi dalam upaya kontrol dan keterlibatan aktif dana bansos logistik kebencanaan.	2. Adanya keterlibatan secara aktif pihak <i>community</i> , <i>business</i> , dan akademisi dalam upaya control dana bansos logistik kebencanaan.
3. Pengumpulan dan penyaluran dana bansos masih dilakukan secara individu, belum ada keterlibatan kolektif antar stakeholder (<i>community</i> , <i>business</i> , <i>government</i> , <i>academic</i>).	3. Pengumpulan dan penyaluran dana bansos dilakukan secara bersama dengan basis integrasi data yang saling terkoneksi antar stakeholder.
4. Data penerima bansos masih belum tersedia secara jelas dan masih kerap ditemukan <i>overmapping</i> data penerima (nama kosong) dan tidak bisa diakses dengan mudah oleh stakeholder terkait.	4. Manajemen data penerima bansos yang tertata rapih tanpa adanya kecurangan serta user friendly sehingga mempermudah stakeholder terkait dalam melakukan pengambilan keputusan.
5. Masih maraknya kasus korupsi dana bansos yang diduga disebabkan adanya motivasi memukuk kekayaan untuk diri sendiri tanpa memperdulikan kepentingan public serta pendidikan karakter yang masih perlu ditingkatkan.	5. Upaya penekanan kasus korupsi sebagai wujud optimalisasi kesejahteraan bagi penerima dana bansos sehingga meringankan beban korban bencana sekaligus sebagai upaya percepatan pemulihan pasca bencana.

Stakeholder Analysis

Tabel 4. Stakeholder Analisis

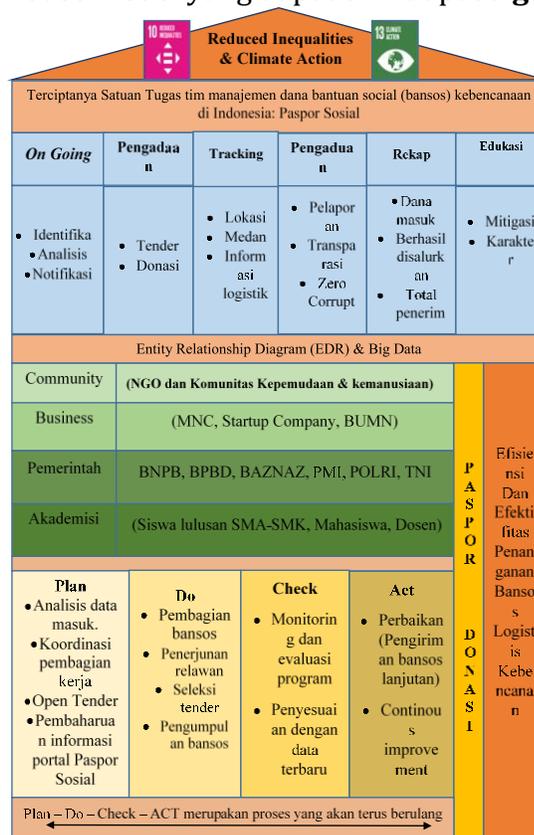
Stakeholders	Peran / Fungsi
Community (Non Government Organizations dan Komunitas Kepemudaan) serta	<ul style="list-style-type: none"> Pihak pengurus dan pengelola Paspor social yang memiliki peran sebagai satuan tugas (NGO: Kita Bisa, Dompet Duava, Ayo Peduli, Gandeng Tangan,

organisasi berbasis kemanusiaan)	Lembaga amil zakat (LAZ) dan NGO sejenis).
	<ul style="list-style-type: none"> • Berperan sebagai pemberi input dana bantuan social.
Business (MNC, Company, BUMN)	Startup
	<ul style="list-style-type: none"> • Berperan sebagai pemberi input dana bantuan social • Sarana perusahaan dalam membelanjakan dana Corporate Social Responsibility. • Memanfaatkan <i>platform</i> kami sebagai media promosi dengan iklan berbayar. • Sebagai sarana bagi pelaku bisnis dalam mengontrol dana CSR beserta Pajak yang sudah dikeluarkan supaya dimanfaatkan secara benar dan maksimal. • Melakukan control bersama stakeholder lainnya sehingga meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh oknum pemerintah.
Pemerintah BNPB, BPBD, BAZNAZ, POLRI, TNI, PMI	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung Social Passport baik dari segi regulasi ataupun hukum legal serta materi sebagai platform pertama yang hadir untuk mewadahi dana bansos logistik kebencanaan di Indonesia. • Memberikan sertifikat kepada organisasi kepemudaan atau siswa yang turut serta dalam upaya misi kemanusiaan penanggulangan bencana. • Polri dan TNI sebagai garda terdepan dalam upaya mendukung BNPB dan BPBD dalam melakukan misi kemanusiaan dalam upaya turun lapang membantu proses penanganan bencana.
Akademisi (Siswa Mahasiswa, Dosen)	SMA-SMK,
	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa SMA-SMK, Mahasiswa sebagai volunteer dalam kegiatan kemanusiaan dengan cara turut terlibat sebagai tenaga pembantu dilapangan. <ul style="list-style-type: none"> • Dosen sebagai pengamat sekaligus pemberi masukan dan evaluasi platform dan mekanisme program kegiatan agar Paspr Donasi dapat terus mengalami perbaikan.

Desain Arsitektur Strategi Optimalisasi Dana Bansos Logistik Kebencanaan Melalui The House Model

Sebagai upaya merancang strategi optimalisasi dana bansos logistik kebencanaan,

penulis menggunakan the house model yang dapat dilihat pada **gambar 3 berikut ini**.



Gambar 3. Desain Arsitektur Strategi Optimalisasi Dana Bansos Logistik Kebencanaan **Interface Aplikasi Social Passport**

- **Interface On Going**

Interface On Going merupakan fitur aplikasi yang berisikan informasi terkait bencana alam yang baru saja terjadi dan sedang mendapatkan program bantuan. Adapun *interface* ini memuat tiga komponen inti yaitu: (1) identifikasi korban dan pengungsi yang meliputi data jumlah korban dan pengungsi, cakupan wilayah yang terdampak, identifikasi akses dan kerusakan wilayah; (2) analisis kebutuhan yang terdiri dari sandang, pangan, penampungan sementara, air bersih dan sanitasi, kebutuhan kelompok rentan seperti lansia dan anak dibawah dua tahun; (3) notifikasi terkait bencana alam yang terjadi di Indonesia. Melalui *interface* ini, pengguna dapat melihat dimana saja lokasi bencana di Indonesia, dan melihat seberapa banyak kebutuhan dana bantuan di lokasi tersebut.

- **Interface Pengadaan**

Interface ini berisikan informasi terkait pembukaan tender pengadaan logistik kebencanaan yang dilakukan oleh stagas. *Interface* ini akan secara langsung terhubung dengan *website* LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) sehingga aliran dana dan juga bantuan yang diberikan dapat dipantau dengan mudah. Pada bagian ini pula, pemilik akun perusahaan akan mendapatkan notifikasi jika terdapat pembukaan tender baru.

- **Interface Tracking**

Berisikan data perjalanan paket bantuan yang setiap waktu selalu diupdate oleh sistem. Pada *interface* ini terdapat informasi terkait medan perjalanan, yang akan mempermudah waktu pengekstimasian kapan paket bantuan tersebut samapi ke tempat tujuan. *Interface* ini memuat terkait detail barang yang dikirimkan termasuk jumlah dan jenisnya. Hal ini ditujukan untuk menyediakan akses transparansi dan akuntabilitas bantuan.

- *Interface* Pengaduan

Pada *interface* ini, masyarakat dapat membuat laporan terkait kondisi bencana alam yang terjadi. Jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam seperti tanah longsor, maka masyarakat dapat memposting informasi terkait bencana tersebut secara detail dan terperinci sehingga akan mempercepat proses bantuan datang ke lokasi tersebut. *Interface* ini dinilai menjadi jawaban atas lambatnya penyebaran informasi terkait bencana alam yang baru saja terjadi. Selain itu, *interface* ini memuat bagian laporan pengaduan terkait transparansi dana bantuan dimana masyarakat yang sudah mendapatkan surat ataupun keterangan mendapat bantuan berhak mengajukan dan melaporkan ketika bantuan tersebut tidak sampai atau tidak disalurkan. *Interface* ini mampu menjadi jawaban atas banyaknya kasus korupsi dan kasus kecurangan pada proses penyaluran bansos. *Interface* ini juga menyediakan sarana mengajukan permohonan bantuan. Masyarakat dapat memposting secara detail terkait kondisi pasca bencana yang terjadi.

- *Interface* Rekap

Interface ini merupakan *interface* yang berfungsi sebagai sarana perekapan terkait semua bencana yang sudah ditangani. Adapun informasi yang dimuat dalam *interface* ini meliputi: (1) jumlah dana yang berhasil di kumpulkan; (2) jumlah dana yang berhasil disalurkan; (3) jumlah masyarakat penerima bantuan. *Interface* ini dirasa mampu menjadi jawaban atas tuntutan akuntabilitas dari lembaga bagian penanggulangan bencana.

- *Interface* Edukasi

Interface ini merupakan fitur tambahan memuat informasi seputar mitigasi bencana. Seluruh informasi pada bagian ini dimuat dalam bentuk video dan gambar sehingga membuat penyajian informasi menjadi lebih mearik. *Interface* ini dapat di isi oleh masyarakat dengan cara mengunggah video yang ingin di tampilkan, dapat berasal dari BPBD maupun *stakeholder* terkait, serta *interface* ini dapat terhubung secara langsung dengan situs youtube untuk memperluas jangkauan video.

KESIMPULAN

1. Dana bantuan social (bansos) secara legalitas hukum dikoordinir oleh kementerian sosial yang mendapatkan audit oleh BPK RI. Kedua lembaga tersebut merupakan institusi pemerintah sehingga pihak business, community, dan akademik tidak dapat melakukan kontrol secara maksimal. Permasalahan korupsi dana bansos logisti kebencanaan dipengaruhi oleh empat factor dan tidak adanya lembaga khusus diyakini sebagai factor utama maraknya kasus korupsi dana bansos logistik kebencanaan.
2. Kondisi ideal pengumpulan dan penyaluran dana bansos logistik kemanusiaan hendaknya dilakukan secara bersama melalui proses kontrol yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder sesuai quadruple helix. Adanya platform yang wewadahi aliran informasi, barang, dan uang dari proses pengumpulan sampai penyaluran yang terarah

dan termonitoring berbasis bigdata dirasa menjadi jawaban atas banyaknya kasus korupsi dana bansos logistik kebencanaan.

3. Grand Design Strategi optimalisasi dana bansos logistik kebencanaan melalui platform Social Passport menggunakan gabungan konsep stakeholder analysis, gap analysis, serta PDCA analysis. Social Passport memiliki enam fitur besar atau *interface* meliputi *On Going*, Pengadaan, Pengaduan, *Tracking*, Rekap, dan Edukasi interface ini hadir atas analisis kebutuhan yang dilakukan melalui benchmarking, gap analysis, serta fishbone analysis. Social Passport mengadopsi konsep EDR beserta supply chain sehingga aliran informasi, uang, dan barang terkoneksi satu sama lain dengan mekanisme kontrol program melalui PDCA analysis yang memiliki system business berulang secara terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aji M.R. 2018. Tiga Kendala Ini Hambat Distribusi Bantuan Pengungsi Gempa Lombok. <https://nasional.tempo.co/read/1119632/tiga-kendala-ini-hambat-distribusi-bantuan-pengungsi-gempa-lombok>. Diakses 28 Oktober 2021.
- [2] An'am K, Mutholib A, Setiyawan F, Andini BA, Sefniwati S. 2018. Kesiapan institusi lokal dalam menghadapi bencana tsunami: studi kasus Kelurahan Air Manis dan Kelurahan Purus, Kota Padang. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*. 6(1): 15-29.
- [3] BBC. 2018. Korupsi Dana Bencana Gempa Lombok, Kejaksaan Bidik Tersangka Baru. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45539980>. Diakses 28 Oktober 2021.
- [4] Brugha, R. F. (2014). Stakeholder analysis A stakeholder analysis. *Health Policy and Planning*, 15(3), 338-345. <https://doi.org/10.1093/heapol/15.3.338>
- [5] BNPB. 2017. Potensi Ancaman Bencana. <https://bnpb.go.id/potensi-ancaman-bencana>. Diakses 28 Oktober 2021.
- [6] CRED. 2012. The United Nations Office of Disaster Risk Reduction. [Online] <http://www.preventionweb.net/countries/idn/data/> [diakses pada 31 Maret 2021].
- [7] Damanik NL, Dirhamsyah M, Fatimah E. 2015. Model distribusi bantuan logistik kemanusiaan pada saat bencana banjir dengan memperhitungkan data iklim. *Jurnal Ilmu Kebencanaan*. 2(1): 35-43.
- [8] Deming, W. Edwards (1982). *Out of the Crisis*, Center for Advanced Engineering Study, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts.
- [9] Dzulfaroh A. 2020. Alasan di Balik Dana Bansos yang Kerap Diselewengkan. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/18/091000965/alasan-di-balik-dana-bansos-yang-kerap-diselewengkan?page=all>. Diakses 28 Oktober 2021.
- [10] Ensmenger, N. (2016). The multiple meanings of a flowchart. *Information & Culture*, 51(3), 321-351.
- [11] Faqih F. 2020. Indonesia Peringkat 2 Negara Terkorup di Asia, Perlu Perampasan Kekayaan Koruptor. <https://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-peringkat-3-negara-terkorup-di-asia-perlu-perampasan-kekayaan-koruptor.html>. Diakses 28 Oktober 2021.
- [12] Findayani A. 2015. Kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kota Semarang. *Jurnal Geografi*. 12(1): 102-114.
- [13] Hadi H, Agustina S, Subhani A. 2019. Penguatan kesiapsiagaan stakeholder dalam

- pengurangan risiko bencana gempabumi. 3(1): 30-40
- [14] Hafil. 2019. Korupsi di Atas Penderitaan Korban Bencana Alam. <https://republika.co.id/berita/kolom/fokus/plgszk318/korupsi-di-atas-penderitaan-korban-bencana-alam>. Diakses 28 Oktober 2021.
- [15] Heryana A. 2020. Pengertian dan Jenis Bencana. Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- [16] Horovitz J., Corboz A.V. 2007. A Dream with a Deadline: Turning Strategy into Action. Harlow. [GB]: FT Prentice Hall
- [17] Hunadi, H., & Dhewanto, W. (2015). Quadruple Helix Mapping Collaboration For Fashion Small Medium. *Journal of Business and Management*, 4(3), 394–406.
- [18] Husna C. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan bencana di rsudza banda aceh. *Idea Nursing Journal*. 3(2): 10-19.
- [19] Irianto R. 2020. Kisruh Bansos Karena Kurangnya Koordinasi dan Lailainya Pemda. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/313576/kisruh-bansos-karena-kurangnya-koordinasi-dan-lailainya-pemda>. Diakses 28 Oktober 2021.
- [20] Ishikawa, K. 1968. Guide to Quality Control. Tokyo. Japan: Asian Productivity
- [21] Organization.
- [22] Jienardy C. 2017. Gap Analisis Persepsi dan Ekspetasi Konsumen Terhadap Kualitas Layanan Harga Kualitas Produk Esus. *Jurnal Performa*. Vol 1 (6).
- [23] Kamil I. 2020. Risiko Korupsi Tinggi Jika Data Penerima Bansos Tak Sesuai NIK. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/19/16482961/kpk-risiko-korupsi-tinggi-jika-data-penerima-bansos-tak-sesuai-nik>. Diakses 28 Oktober 2021.
- [24] Kumparan. 2020. Sederet Kasus Korupsi Terkait Bantuan Bencana yang Pernah ditangani KPK. <https://kumparan.com/kumparannews/sederet-kasus-korupsi-terkait-bantuan-bencana-yang-pernah-ditangani-kpk-1uj7W9euLie>. Diakses 28 Oktober 2021.
- [25] Kurniyanti MA. 2012. Peran tenaga kesehatan dalam penanganan manajemen bencana. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada*. 1(1): 85-92.
- [26] Murliana, Fauziah N, Meilina M. 2019. Komunikasi dalam penanggulangan bencana oleh badan nasional penanggulangan bencana (bnpb) melalui pendekatan budaya. *Jurnal Komunikasi Mahasiswa*. 1(1): 34-41.
- [27] Paulus, M., & Devie. (2013). Analisa Pengaruh Penggunaan Benchmarking Terhadap Keunggulan Bersaing dan Kinerja Perusahaan. *Business Accounting Review*, 1(2), 39–49.
- [28] Prihatin RB. 2018. Masyarakat sadar bencana: pembelajaran dari Karo, Banjarnegara, dan Jepang. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. 9(2): 221-239.
- [29] Purbayu A, Agustiningsih Y. 2016. Perancangan sistem warehouse bantuan logistik korban bencana alam, studi kasus: gunung Merapi. *Indonesian Journal of Applied Informatics*. 1(1): 1-12.
- [30] Race, D. and J. Millar. 2006. Training Manual: Social and Community Dimensions of ACIAR Projects. Australian Center for International Agricultural Research – Institut for Land, Water, and Society of Charles Sturt University. Australia.
- [31] Ramadhan A. 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/29/06222141/indeks-persepsi-korupsi-ri-turun-di-bawah-timor-leste-dan-pertama-sejak-2008?page=all>. Diakses 28 Oktober 2021.

- [32] Sahilala IM, Sarwono, Hanafi I. 2013. Tata kelola distribusi bantuan logistik korban bencana alam. *Jurnal Administrasi Publik*. 3(5): 812-817.
- [33] Saptana dan Ilham. 2017. Manajemen Rantai Pasok Komoditas Ternak dan Daging Sapi. Analisis Kebijakan Pertanian. Vol 15 (1): 83-98.
- [34] Saptoyo R.D.A. 2021 Feb 01. Catatan BNPB: Ada 263 Bencana Sepanjang Januari 2021. Kompas. Rubrik Tren. [diakses 06 April 2021]. <http://www.kompas.com/tren/read/2021/02/01/102800165/catatan-bnpb--ada-263-bencana-sepanjang-januari-2021?page=all>. Diakses 28 Oktober 2021.
- [35] Surwaningsih, Nurdiasmara L, Mujahidah Z. 2019. Lansia dalam menghadapi bencana di Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*. 11(2): 135-146.
- [36] Sutanto. 2012. Peranan k3 dalam manajemen bencana. *Metana*. 8(2): 37-40.
- [37] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana.
- [38] Zaroni. 2017. Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana. Bandung: Supply Chain Indonesia.